



STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN MENGGUNAKAN *ANALYTICAL HIRERARCHY PROCESS*

Ni Made Wijayanti Kusuma Ardani¹, Agni Grandita Permata Sari^{2,*}

¹Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

Jalan R.E Martadinata No 1 Kota Banjarmasin, Indonesia

²Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri

Jalan Ir. Sukarno Km. 20 Kabupaten Sumedang, Indonesia

*penulis koresponden

email: agni.grandita@ipdn.ac.id

Abstract

Voter participation in the Banjarmasin City elections has decreased from 65.63 percent in 2015 to 55.7 percent in 2020. This study aims to identify various supporting and inhibiting factors, as well as formulate the best strategy to increase voter participation in the next period. This research is a descriptive-qualitative study involving informants who were determined purposively, namely: commissioners and heads of the General Election Commission (KPU) division, and various informants from the Voting Organizing Group (KPPS) and voter groups who were determined by snowball technique. In addition, survey is also used and the data is analysed using the Analytical Hierarchy Process (AHP) to determine the priority strategy. This study found that the spread of the Covid-19 virus and bad weather which technically affected regional election activities reduced the level of voter turnout in the Banjarmasin City regional head election. Meanwhile, regulations and legal products, election administration resources, funding, and facilities/infrastructure are the supporting variables in increasing participation. The KPU of Banjarmasin City has three initiatives, namely 'village care on elections' program, election information socialization on print-media, and socialization through social media to increase voter participation. Of the three strategies, 'Villages care on elections' is the priority strategy for encouraging engagement, according to the findings of an analysis using AHP.

Keywords: *Analytical Hierarchy Process, voter participation, local election, election commission.*

Abstrak

Partisipasi pemilih pada pilkada Kota Banjarmasin mengalami penurunan dari sebesar 65,63 persen pada tahun 2015 menjadi 55,7 persen pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi terbaik dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada periode selanjutnya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan melibatkan informan yang ditentukan secara purposif, yaitu: komisioner dan ketua divisi Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan berbagai informan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan kelompok pemilih yang ditentukan secara *snowball*. Selain itu, teknik survei juga digunakan dan analisis data menggunakan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan strategi prioritas. Penelitian ini menemukan bahwa penyebaran virus Covid-19 dan buruknya cuaca yang secara teknis mempengaruhi kegiatan pilkada menurunkan tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin. Sementara itu, peraturan dan produk hukum, sumber daya penyelenggara pemilu, pendanaan, dan sarana/prasarana merupakan variabel pendukung dalam meningkatkan partisipasi. KPU Kota Banjarmasin memiliki tiga inisiatif, yakni program desa peduli pemilu, sosialisasi melalui media cetak, dan sosialisasi melalui media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Dari ketiga strategi tersebut, 'Desa peduli pemilu' merupakan strategi prioritas untuk mendorong keterlibatan, menurut temuan analisis menggunakan AHP.

Kata Kunci: *Analytical Hierarchy Process, partisipasi pemilih, pemilihan kepala daerah, lembaga pemilihan.*

I. PENDAHULUAN

Hampir semua negara demokrasi, salah satunya Indonesia menggunakan pemilihan umum sebagai cara dalam menyeleksi pemimpin politik. Pada konstitusi Indonesia pada Pasal 22E ayat (1) disebutkan

'pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali'. Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (5) bahwa penyelenggaraan pemilu tersebut dilakukan oleh sebuah komisi pemilihan yang bersifat nasional, tetap,

dan mandiri. Pemilu merupakan wadah dari kedaulatan rakyat dimana rakyat bebas memilih sesuai dengan keinginannya. Pemilu merupakan alat demokrasi yang dekat dengan obsesi demokrasi di bawah pemerintahan yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat.

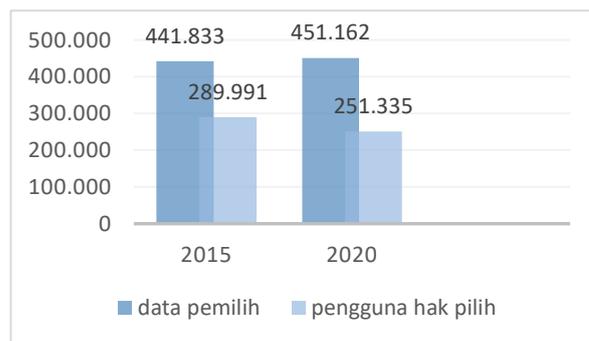
Pemilu demokratis mensyaratkan partisipasi rakyat (Amirudin & Bisri, 2006; Arif, 2020). Harapannya adalah perolehan suara dalam pemilu merefleksikan keinginan pemilih sehingga berbagai kebijakan selama kurun waktu lima tahun tersebut berpihak kepada mereka. Partisipasi masyarakat yang tinggi menandakan bahwa rakyat mampu memahami dan mengikuti serta menggunakan hak suaranya dengan baik. Namun sebaliknya, apabila partisipasi masyarakat rendah akan menandakan kurangnya apresiasi dari rakyat dalam konteks kegiatan pemilihan umum. Dengan kata lain, kekuasaan politik memiliki relasi dengan legitimasi yang diterima (Beetham, 2016).

Pelaksanaan pemilu kadang kala tidak berjalan sebagaimana mestinya, salah satunya karena kendala teknis, seperti bencana. Pada tahun 2019, hampir semua negara, tak terkecuali Indonesia terdampak satu masalah serius, yaitu merebaknya *coronavirus disease* (Covid-19). Pandemi ini masih terus berlangsung menjelang pemilihan kepada daerah tahun 2020 maupun sampai saat ini. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus Covid-19 mulai dari *stay at home*, menjaga jarak, memakai masker saat keluar rumah dan menggunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol, penerapan PSBB, PPKM, dan PPKM Mikro sesuai dengan tingkat kasus Covid-19 yang terjadi di masing-masing daerah. Pemerintah juga berupaya meminimalisir laju penambahan kasus Covid-19 agar masyarakat dapat ikut aktif dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Salah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah adalah Kota Banjarmasin.

Rendahnya partisipasi pemilih paling tidak disebabkan oleh enam hal, seperti: literasi politik pemilih yang rendah; efikasi politik rendah atau anggapan pemilih bahwa pemilu akan berdampak baik bagi mereka; misinformasi akibat begitu derasnya arus informasi; melemahnya relasi pemilih dan partai; sistem pemilihan yang rumit; dan aktivitas golput dimaknai sebagai bentuk protes (Hertanto, 2017).

Untuk mensukseskan pilkada ini, KPU Kota Banjarmasin telah melakukan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung. Ini merupakan salah satu strategi KPU agar partisipasi masyarakat meningkat pada pilkada ini walaupun dalam kondisi pandemi (komunikasi personal dengan Kasubag Hukum KPU Kota Banjarmasin). KPU menetapkan target tingkat partisipasi pada semua pemilihan kepala daerah tahun 2020 sebesar 77,5% (Farisa, 10 Juli 2020). Namun kenyataannya, tingkat partisipasi pada pilkada Banjarmasin hanya 55,7% (KPU Kota Banjarmasin, 2021). Hanya 251.304 pemilih dari total 451.162 pemilih yang melakukan pencoblosan. Angka ini lebih rendah dari pemilu 2015. Pada pilkada tahun

2015 akumulasi partisipasi pemilih mencapai angka 65,63% sebagaimana disajikan pada Gambar 1:



Gambar 1
Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Tahun 2015 dan Tahun 2020

Sumber: data diolah dari KPU Kota Banjarmasin, 2021

Secara lebih spesifik, berikut ini ditampilkan data perbandingan jumlah pemilih dan pengguna hak pilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020:

Tabel 2
Jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020

Data Pemilih		Pengguna Hak Pilih	
Jumlah pemilih dalam DPT	448.157	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	248.459
Jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH)	28	Jumlah yang pindah memilih (DPPH)	28
Jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan (DPTb)	2.969	Jumlah pengguna hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan E-KTP atau surat keterangan (DPTb)	2.781
Jumlah	451.162	Jumlah	251.304

Sumber : data diolah dari KPU Kota Banjarmasin (2021)

Berdasarkan literatur, partisipasi adalah urat nadi dari demokrasi. Hal ini dikarenakan beberapa fungsi penting yang dibawanya, yaitu: mendukung program politik dan pembangunan, sarana menggaungkan kepentingan rakyat untuk perbaikan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan, dan sarana input pada tahap perencanaan dan implementasi pembangunan (Handaningrum & Rini, 2014). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat akan meningkat seiring menguatnya partisipasi rakyat (Wahyudi et al., 2013).

Begitu juga sebaliknya, rendahnya partisipasi akan menjadi *alarm* yang mengkhawatirkan bagi berjalannya pemerintahan yang baik karena rendahnya fungsi kontrol dari rakyat (Faulk, 2010). Lebih jauh, partisipasi dalam demokrasi juga menjadi sarana pendidikan politik, tidak hanya berdampak pada arah keputusan politik itu sendiri, akan tetapi juga secara intrinsik berpengaruh pada penguatan pikiran dan karakter warga negara (Dacombe & Parvin, 2021; Pateman, 1970).

Dalam pasal 133A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengembangkan kehidupan demokrasi di daerah khususnya melalui partisipasi publik yang lebih. Partisipasi publik dalam pemilu tidak hanya menjadi salah satu parameter keberhasilan sebuah pemilihan tetapi juga tentang legitimasi masyarakat terhadap pemimpin yang dipilihnya.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak mengkaji terkait partisipasi pemilu. Misalnya Aspinall et al. (2021) yang fokus meneliti tentang partisipasi perempuan dalam pilkada. Selain itu, penelitian lain secara spesifik membahas terkait strategi penyelenggara pemilihan dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada pada masa Covid-19, misalnya penelitian Karmanis (2021) di Kota Semarang, dan Wulandari & Sari (2022) di Kabupaten Ponorogo, atau penelitian yang fokus melihat strategi komunikasi yang digunakan, seperti (Estivani, 2021) dan Imanah (2021). Berbagai penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan analisis data menggunakan teknik Miles et al. (2014). Berdasarkan konteks di atas, tulisan ini selain berupaya menggali faktor pendukung dan penghambat serta strategi prioritas apa yang dilakukan oleh KPU pada Pilkada Kota Banjarmasin pada tahun 2020 yang diselenggarakan pada situasi pandemi Covid-19. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan metode kualitatif dengan analisis data Miles dan Huberman, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai alat untuk merumuskan strategi prioritas dalam rangka mengingatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Banjarmasin pada periode berikutnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara studi dokumentasi, survei. Kedua teknik, baik sampel purposif maupun *snowball* digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. *Purposive sampling* digunakan untuk menentukan informan ketua komisi pemilihan umum (KPU) Kota Banjarmasin, komisioner KPU divisi sosialisasi dan pendidikan

pemilih, ketua badan pengawas pemilu Kota Banjarmasin sedangkan *snowball sampling* digunakan untuk menentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat yang berpartisipasi pada pilkada 2020.

Selanjutnya, untuk menentukan strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dilakukan analisis menggunakan *Analytical Hierarchy Proses* (AHP). Metode ini adalah salah satu cara untuk mengambil keputusan dengan pelibatan berbagai pertimbangan kriteria dan alternatif yang dipilih. Berbagai pertimbangan tersebut akan membentuk hirarki sehingga suatu masalah yang kompleks akan terlihat lebih terstruktur dan sistematis (Saaty dalam Yusuf (2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2020

Partisipasi pemilih pada pilkada 2015 relatif rendah dan semakin turun pada 2020. Walaupun terjadi penurunan tingkat partisipasi, akan tetapi jika dilihat kondisi kedua pemilihan yang berbeda dimana pada periode sebelumnya tidak ada hambatan yang diakibatkan oleh pandemi. Berikut ini akan diuraikan faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020.

1) FAKTOR PENDUKUNG

Pada pilkada tahun 2020 walaupun pada masa pandemi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada masih dipengaruhi oleh faktor pendukung di antaranya peraturan/produk hukum, sumber daya penyelenggara, anggaran, dan sarana dan prasarana.

Pertama, regulasi/produk hukum yang jelas. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 mengenai pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam covid-19. Dengan adanya peraturan ini pemilih menjadi tidak khawatir datang ke TPS sehingga tingkat partisipasi bisa dijaga. Seperti yang disampaikan oleh ketua KPU kota Banjarmasin dalam wawancara yang menyatakan "kalau dari kami kota Banjarmasin tidak ada menambah peraturan atau membuat peraturan sendiri mengenai tahapan pemilihan ini. Kami mempedomani dan menjalankan peraturan yang diterbitkan oleh pusat". Senada dengan itu Ketua Bawaslu kota Banjarmasin menyatakan "Selama pelaksanaan kegiatan saya memantau dan mengawasi jalannya proses pemilihan, saya lihat KPU kota Banjarmasin sangat berpedoman dengan peraturan yang ada".

Kedua, sumber daya penyelenggara pemilihan yang kompeten. Dilihat dari sumber daya penyelenggara pemilu Kota Banjarmasin tahun 2020

sudah dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan setelah melewati proses seleksi yang ketat. Sumber daya penyelenggara pemilu terdiri dari komisioner KPU sebanyak 5 orang, bawaslu sebanyak 15 orang dan ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) sebanyak 15 orang. Seluruh sumber daya ini sudah dilatih melalui bimbingan teknis. Seperti yang dikatakan oleh Ketua KPU Kota Banjarmasin yang menyebutkan: “selama saya menjabat saya juga sering mengikuti bimbingan teknis mengenai fungsi dan tugas saya selama menjabat menjadi ketua KPU Kota Banjarmasin”. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lain dari pihak KPU maupun Bawaslu bahwa mereka seringkali mengikuti dan diikutkan dalam berbagai pelatihan baik teknis seperti teknis pengawasan dan alur pemilihan maupun seminar non teknis, seperti pemahaman terhadap politik, demokrasi, dan pemilihan.

Ketiga, ketersediaan anggaran yang cukup.

Dari segi anggaran, KPU Kota Banjarmasin menganggarkan untuk pelaksanaan pilkada tahun 2020 sangat besar yaitu Rp32.000.000.000,-. Anggaran ini dua kali lipat lebih banyak dari pemilu sebelumnya, yaitu sebesar Rp16.168.000.000. Salah satu penyebab peningkatan ini adalah untuk biaya pelaksanaan protokol kesehatan selama covid-19. Tercukupinya anggaran sesuai dengan kebutuhan tersebut menandakan seriusnya pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya Pilkada. Banyak kondisi di daerah lain dimana anggaran yang diajukan oleh KPU daerah yang disetujui sebagian dari yang diajukan, seperti kasus di Provinsi Bengkulu (Wibawa, 2018).

Keempat, Sarana dan prasarana yang representatif. Sarana dan prasarana pada pilkada 2020 disediakan dengan baik dan lengkap oleh KPU Kota Banjarmasin. Berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2020, peserta pemilihan diberikan bantuan dana dalam berkampanye baik berupa uang, barang, dan jasa. Walaupun demikian, terdapat batasan dalam penggunaan dana tersebut, yaitu terbatas pada kegiatan rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye dan jasa manajemen/konsultan. Selain itu, KPU Kota Banjarmasin juga menyediakan ratusan TPS yang tersebar diberbagai tempat dengan fasilitas yang lengkap serta pada masa pandemi saat pelaksanaan pemilihan KPU juga menyediakan sarana dalam mencegah penyebaran virus seperti handsanitizer, disinfektan, hingga alat untuk pengukur suhu tubuh serta alat pelindung diri bagi pelaksana kegiatan pemilihan. Alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang disediakan oleh KPU untuk pasangan calon yang jumlahnya berprdoman pada keputusan KPU Kabupaten/ Kota yaitu sebanyak 30 item untuk media cetak dan para calon boleh menambah sebanyak 200 persen dari yang telah sediakan KPU.

2) FAKTOR PENGHAMBAT

Tidak hanya faktor pendukung yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan pilkada Kota Banjarmasin tetapi juga faktor penghambat. Beberapa hambatan yang dialami saat pilkada Kota Banjarmasin

tahun 2020 adalah merebaknya virus covid-19, perubahan cuaca yang menghambat kegiatan pemilihan, dan TPS yang jaraknya kurang terjangkau.

Pertama, bencana non-alam covid-19.

Munculnya pandemi berdampak besar bagi terlaksananya seluruh rangkaian pilkada. Dalam hal pelaksanaan pilkada, pandemi menyebabkan terbatas nya mobilisasi mulai dari kegiatan sosialisasi penyelenggara, kampanye peserta pilkada, hingga pelaksanaan pilkada. Kegiatan tatap-muka yang selama ini dilakukan menjadi sangat dibatasi sehingga komunikasi menjadi tidak maksimal. Sementara itu, KPU Kota Banjarmasin dan peserta pilkada belum terlalu siap dalam melaksanakan komunikasi secara virtual.

Begitu juga dengan peserta yang kesulitan dalam mengkomunikasikan program-programnya selama masa kampanye karena ada larangan dalam mengumpulkan massa. Walaupun tidak maksimal, kampanye lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan sosial media, serta media lainnya. Selain itu KPU Kota Banjarmasin juga melakukan pembatasan dengan cara membagi waktu pelaksanaan pemilihan tiap keluarga, setiap 1 (satu jam) kurang lebih diperkenankan kurang lebih 500 KK untuk mengikuti pemilihan.

Kedua, perubahan cuaca yang menghambat kegiatan pemilihan.

Pada hari pemilihan, cuaca Kota Banjarmasin kurang bersahabat karena turunnya hujan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam dari pukul 10.00-12.00 waktu setempat sehingga secara teknis juga menjadi penghambat bagi pemilih untuk datang ke TPS. Melalui wawancara dengan ketua KPU Kota Banjarmasin didapatkan informasi bahwa masyarakat pada jam pemilihan tersebut kebanyakan tidak mengikuti pemilihan karena hujan yang sangat deras. Sementara itu, ketika hujan reda, kebanyakan masyarakat enggan datang ke TPS dikarenakan tidak mengetahui bahwa masih diperbolehkan melakukan pemilihan walupun bukan dari jam yang ditentukan, sehingga banyak masyarakat yang absen. Selain melonggarkan batas waktu pencoblosan, penyelenggara juga telah menambah jumlah TPS pada pemilihan 2020. Berikut ini perbandingannya: Pengaruh cuaca ini sangat besar terhadap partisipasi pemilih.

Tabel 3
Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS)
Tahun 2015 dan 2020

No	Tahun	Jumlah TPS
1.	2015	1.122
2.	2020	1.990

Sumber: data diolah dari KPU Kota Banjarmasin (2022)

B. STRATEGI PRIORITAS PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2020

1) STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH OLEH KPU KOTA BANJARMASIN

Konsep manajemen strategi yang peneliti gunakan merupakan konsep yang dikemukakan oleh Hunger & Wheelen (2000) mencakup 4 (empat) dimensi yang meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Lingkungan diamati dengan teliti untuk mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan lingkungan tersebut. Sementara itu, perumusan strategi adalah pengembangan perencanaan jangka panjang dalam menghasilkan langkah-langkah yang efektif berdasarkan analisis faktor yang mendukung dan menghambat dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih. Hasil analisis berbagai faktor yang berpengaruh tersebut akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tepat. Selanjutnya, setelah perumusan strategi, maka dilakukan implementasi dimana diartikan sebagai proses penempatan rencana menjadi tindakan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Setelah itu dilakukan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja. Siklus ini perlu diterapkan untuk menentukan strategi perbaikan untuk kegiatan serupa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Dalam konteks upaya untuk menaikkan tingkat partisipasi dalam pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin, KPU Kota Banjarmasin telah memiliki berbagai langkah strategis yang telah dilakukan agar masyarakat mempunyai kesadaran dan lebih memahami akan pentingnya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Berbagai strategi yang dimiliki oleh KPU Kota Banjarmasin, antara lain:

(1) Program desa peduli pemilu

Program ini merupakan program dari KPU RI dan diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program desa peduli pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/ atau walikota dan wakil walikota. Tujuan dari dibentuknya program ini yaitu meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar menjadi pemilih yang berdaulat, memberi pemahaman kepada masyarakat dalam memilah informasi sehingga masyarakat tidak mudah termakan berita palsu tentang pemilihan, menjauhkan masyarakat dari praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu dan pemilihan, meningkatkan kalitas dan kuantitas partisipasi, membentuk kandidat pemilih yang mampu menjadi penggerak dan pembangkit kesadaran politik.

Pada pemilu tahun 2020, program ini baru terlaksana di dua kelurahan yaitu kelurahan Pekapuran Raya dan Kelurahan Gadang. Hal ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 6 kelurahan. Hal ini dikarenakan KPU Kota Banjarmasin lama menunggu arahan dan anggaran dari KPU Provinsi karena ini merupakan program KPU RI.

Selain itu KPU Kota Banjarmasin juga membuat kegiatan yang serupa dan sejalan dengan program yang dibuat oleh KPU RI yaitu program Pendidikan pemilih yang dimana program ini mempunyai tujuan yang hampir sama dengan program sebelumnya namun ditekankan agar masyarakat tidak menjadi masyarakat yang apatis dan lebih mengerti dan peduli terhadap pemilu.

Berdasarkan informasi dari salah seorang komisioner KPU Kalimantan Selatan, Edy Ardiansyah, program ini akan difokuskan pada 6 desa/kelurahan di Kota Banjarmasin yang memiliki tingkat partisipasi dibawah 50% pada saat Pilkada 2020. Selain itu kegiatan ini akan melibatkan pihak terkait melalui penerbitan nota kesepahaman dengan pemerintah Kota Banjarmasin dan KPU Kota Banjarmasin. Tujuannya adalah agar nantinya bisa berkoordinasi dengan struktural di tingkat desa/kelurahan tersebut dan juga untuk memudahkan dalam mengumpulkan peserta dalam kegiatannya. Dengan memfokuskan pada area dimana partisipasi pemilih rendah maka diharapkan diketahui penyebab dan solusi terbaik untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Pelaksanaan program pada beberapa area tertentu saja menyisakan catatan dimana terjadi ketidakmerataan perlakuan bagi seluruh pemilih yang ada di Kota Banjarmasin.

(2) Sosialisasi melalui media cetak

Pada pemilu walikota Banjarmasin tahun 2020, KPU memberikan kesempatan setiap pasangan calon selama 72 hari untuk melakukan sosialisasi dan kampanye. Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon tidak lepas dari penggunaan media konvensional berupa baliho, pamflet, selebaran, brosur, spanduk, stiker, koran dan lain-lain. KPU Kota Banjarmasin juga melaksanakan kampanye bekerja sama dengan surat kabar harian Banjarmasin post, Kompas, Tribun Borneo untuk menyosialisasikan jadwal, tahapan pelaksanaan, hingga visi-misi pasangan calon pada periode tersebut.

Penggunaan media-media seperti di atas diharapkan mampu menjangkau target pemilih yang belum terpapar secara intensif dengan media virtual seperti melalui media sosial. Akan tetapi, penggunaan media seperti ini perlu memperhatikan ketersediaan anggaran karena penggunaan media konvensional membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, dalam konteks polarisasi, penggunaan media konvensional dinilai lebih baik (Udani et al., 2018).

(3) Sosialisasi melalui media elektronik

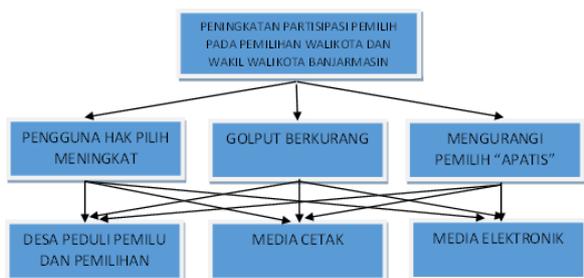
Pada pemilu Walikota Banjarmasin tahun 2020, KPU memanfaatkan media elektronik sebagai sarana komunikasi pemilu. Target dari dilaksanakannya komunikasi politik melalui media elektronik ini agar

masyarakat lebih mudah menerima informasi mengenai tahapan maupun mengenai pasangan calon melalui media sosial, televisi, maupun videotron yang terdapat di jalan umum. Untuk dapat memantau dari kampanye dari pasangan calon maka akun media sosial resmi setiap pasangan calon harus didaftarkan ke KPU. Pelaksanaan sosialisasi melalui media elektronik juga diberikan beberapa ketentuan. KPU Kota Banjarmasin sendiri mempunyai minimal 1 akun pada setiap sosial media untuk mensosialisasikan jadwal pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sedangkan pelaksanaan kampanye melalui media elektronik untuk setiap pasangan calon diberikan batasan hingga 20 akun sosial media. Namun pelaksanaan pemilihan di Kota Banjarmasin tahun 2020 tidak ada pasangan calon yang melebihi 20 akun sosial media, rata-rata hanya memiliki 8-12 akun sosial media yang mereka gunakan dalam kegiatan kampanye.

Penggunaan metode sosialisasi dan kampanye menggunakan media elektronik terutama media sosial ini memiliki kelebihan lebih interaktif dan pesan yang ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh warga Kota Banjarmasin. Beberapa studi menunjukkan manfaat media sosial untuk meningkatkan partisipasi pemilih (Rojabiaturohmah & Pujianti, 2020; Stier et al., 2018). Akan tetapi menggunakan media sosial juga tidak terlepas dari dampak negatif, seperti kajian dari Kubin & von Sikorski (2021) dan Beaufort (2018) yang menunjukkan potensi polarisasi yang lebih besar di antara pemilih.

2) ANALISIS STRATEGI PRIORITAS MENGGUNAKAN ANALYTICAL HIRERARCHY PROCESS (AHP)

Dalam penentuan strategi prioritas, maka digunakan metode AHP. Sesuai dengan tahapannya, pertama sekali adalah dengan membentuk hirarki. Pada tahapan ini, hirarki dibentuk berdasarkan penetapan tujuan, kriteria yang mendasari tujuan alternatif serta alternatif strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Gambar berikut ini merupakan hasil penyusunan hirarki AHP dalam strategi peningkatan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan:



Gambar 2
Hierarki Pengambilan Keputusan AHP

Sumber: Data diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan Gambar 2 dianalisis bahwa penyusunan hierarki proses AHP meliputi tujuan, kriteria dan strategi alternatif yang pada penelitian kali ini menggunakan tujuan yaitu peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin. Elemen kriteria yang digunakan yaitu pengguna hak pilih meningkat, golput berkurang, dan mengurangi pemilih "apatitis". Selanjutnya pada elemen alternatif terdapat strategi yang dilakukan dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah Kota Banjarmasin yang kemudian akan ditentukan strategi prioritasnya melalui metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan penilaian dengan membuat matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Dalam tahap ini, kegiatan penilaian dilakukan oleh berbagai responden yang ditentukan. Penilaian dilakukan oleh responden pada kuesioner yang disiapkan. Responden terpilih berasal dari KPU Kota Banjarmasin dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Banjarmasin yakni:

1. Ketua KPU Kota Banjarmasin. Ibu Rahmiyati Wahdah, S.Pd
2. Komisioner KPU Divisi Sosialisasi pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Bapak Muhammad Taufuqurrakhman, S.sos
3. Ketua BAWASLU kota Banjarmasin. Bapak H. Muhammad Yasar, Lc.

Pelaksanaan pengisian kuisisioner dilakukan secara online melalui *google form* untuk memberikan penilaian dengan metode "*Pairwise comparasions*" dengan mengacu skala Saaty (1-9) yang kemudian diinput pada aplikasi *superdecisions* seperti pada tabel berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Pengisian Pairways Comparasion Pada Aplikasi Superdecisions

Hasil pengisian masing-masing pakar	
<p>Comparisons wrt "PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN" node in "CRITERIA" cluster</p> <p>1. GOLPUT BERKURANG- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MENGURANGI PEMILIH "APATIS"</p> <p>2. GOLPUT BERKURANG- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p> <p>3. MENGURANGI PEMILIH "APATIS"- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p>	<p>GOLPUT BERKURANG</p> <p>MENGURANGI PEMILIH "APATIS"</p> <p>PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p>
<p>Comparisons wrt "PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT" node in "ALTERNATIVES" cluster</p> <p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN is very strongly more important than MEDIA CETAK</p> <p>1. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA CETAK</p> <p>2. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p> <p>3. MEDIA CETAK- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p>	<p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN</p> <p>MEDIA CETAK</p> <p>MEDIA ELEKTRONIK</p>
<p>Comparisons wrt "MENGURANGI PEMILIH "APATIS" node in "ALTERNATIVES" cluster</p> <p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN is moderately more important than MEDIA CETAK</p> <p>1. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA CETAK</p> <p>2. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p> <p>3. MEDIA CETAK- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p>	<p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN</p> <p>MEDIA CETAK</p> <p>MEDIA ELEKTRONIK</p>
<p>Comparisons wrt "GOLPUT BERKURANG" node in "ALTERNATIVES" cluster</p> <p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN is strongly more important than MEDIA CETAK</p> <p>1. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA CETAK</p> <p>2. DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p> <p>3. MEDIA CETAK- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p>	<p>DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN</p> <p>MEDIA CETAK</p> <p>MEDIA ELEKTRONIK</p>
1. Rahmiyati Wahdah, S.Pd	
<p>Comparisons wrt "PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN" node in "CRITERIA" cluster</p> <p>1. GOLPUT BERKURANG- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MENGURANGI PEMILIH "APATIS"</p> <p>2. GOLPUT BERKURANG- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p> <p>3. MENGURANGI PEMILIH "APATIS"- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p>	<p>GOLPUT BERKURANG</p> <p>MENGURANGI PEMILIH "APATIS"</p> <p>PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT</p>
<p>Comparisons wrt "PENGUNA HAK PILIH MENINGKAT" node in "ALTERNATIVES" cluster</p> <p>DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN is extremely more important than MEDIA CETAK</p> <p>1. DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA CETAK</p> <p>2. DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p> <p>3. MEDIA CETAK- >=0.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 >=0.5 No comp. MEDIA ELEKTRONIK</p>	<p>DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN</p> <p>MEDIA CETAK</p> <p>MEDIA ELEKTRONIK</p>

Comparisons wrt "MENGURANGI PEMILIH "APATIS"" node in "ALTERNATIVES" cluster DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN is very strongly to extremely more important than MEDIA CEK		DESA PE MEDIA CE MEDIA EL
1. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA CETAK
2. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. MEDIA CETAK	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
Comparisons wrt "GOLPUT BERKURANG" node in "ALTERNATIVES" cluster DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN is very strongly more important than MEDIA CETAK		DESA PEDU MEDIA CET MEDIA ELE-
1. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA CETAK
2. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. MEDIA CETAK	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
2. Muhammad Taufuqurrakhman, S.sos		
Comparisons wrt "PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN W AKIL WALIKOTA BANJARMASIN" node in "CRITERIA" cluster		IGOLPU MENGUR PENGG
1. GOLPUT BERKURAN-	>>+9.5	MENGURANGI PEMI-
2. GOLPUT BERKURAN-	>>+9.5	PENGGUNA HAK PI-
3. MENGURANGI PEMI-	>>+9.5	PENGGUNA HAK PI-
Comparisons wrt "PENGGUNA HAK PILIH MENINGKAT" node in "ALTERNATIVES" cluster DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN is extremely more important than MEDIA CETAK		DESA PE MEDIA CE MEDIA E
1. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA CETAK
2. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. MEDIA CETAK	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
Comparisons wrt "MENGURANGI PEMILIH "APATIS"" node in "ALTERNATIVES" cluster DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN is very strongly to extremely more important than MEDIA		DESA P MEDIA C MEDIA E
1. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA CETAK
2. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. MEDIA CETAK	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
Comparisons wrt "MENGURANGI PEMILIH "APATIS"" node in "ALTERNATIVES" cluster DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN is very strongly to extremely more important than MEDIA		DESA P MEDIA C MEDIA E
1. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA CETAK
2. DESA PEDULI PEM-	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. MEDIA CETAK	>>+9.5	MEDIA ELEKTRONI-
3. H.Muhammad Yasar, Lc		

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

Tabel 4 menunjukkan hasil rekapitulasi input hasil kuisioner pada "pairways comparasion" aplikasi *superdecision*. Kemudian hasil kuisioner tersebut diolah dengan aplikasi *superdecision* pada bagian *synthesize* sehingga diperoleh hasil final berikut ini:

Tabel 5
Hasil Penghitungan AHP pada Aplikasi Superdecisions

Hasil penghitungan AHP masing-masing pakar				
Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN		1.000000	0.616950	0.3084
MEDIA CETAK		0.147007	0.090696	0.0453
MEDIA ELEKTRONIK		0.473870	0.292354	0.1461
1. Rahmiyati Wahdah, S.Pd				
Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
DESA PEDULI PEMILU & PEMILIHAN		1.000000	0.773679	0.386839
MEDIA CETAK		0.227393	0.175929	0.087965
MEDIA ELEKTRONIK		0.065133	0.050392	0.025196
2. Muhammad Taufuqurrakhman, S.sos				
Name	Graphic	Ideals	Normals	Raw
DESA PEDULI PEMILIH DAN PEMILIHAN		1.000000	0.777957	0.38897
MEDIA CETAK		0.095747	0.074487	0.03724
MEDIA ELEKTRONIK		0.189671	0.147556	0.07377
3. H.Muhammad Yasar, Lc				

Sumber: diolah oleh penulis (2022)

Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil penghitungan dari aplikasi *superdecisions* yang diisi oleh responden menunjukkan strategi yang sesuai dalam sasaran KPU Kota Banjarmasin yaitu pengguna hak pilih meningkat, golput berkurang dan mengurangi pemilih "apatitis" adalah **Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan** yang

dijadikan strategi utama untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah Kota Banjarmasin pada pilkada periode selanjutnya.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Banjarmasin 2020 dapat disimpulkan berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan, dimana faktor-faktor yang mendukung, yaitu adanya regulasi/produk hukum yang jelas, sumber daya penyelenggara pemilihan, yang memiliki kompetensi, anggaran yang cukup yang disiapkan KPU untuk pelaksanaan pemilihan, dan sarana dan prasarana yang representatif. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat, dapat diidentifikasi, seperti munculnya pandemi covid-19 yang menghambat sebagian besar aktivitas pemilihan mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga pemilihan, dan cuaca yang tidak mendukung pada saat pencoblosan.

Sementara itu, terdapat strategi peningkatan partisipasi pemilih pada pilkada Kota Banjarmasin yaitu program 'desa peduli pemilu', sosialisasi melalui media cetak dan sosialisasi melalui media elektronik. Dari berbagai strategi tersebut, strategi prioritas yang diperoleh dari analisis menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah dengan menjalankan program 'desa peduli pemilu'.

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi, penulis merekomendasikan agar program Desa Peduli Pemilu dilengkapi dengan berbagai kegiatan yang terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga unsur penting dari masyarakat, seperti perguruan tinggi dan kelompok masyarakat yang peduli dengan keberlangsungan pemilu dan demokrasi, khususnya di Kota Banjarmasin. Dengan demikian, keberhasilan dari program yang fokus pada intervensi area dimana tingkat partisipasi pemilih rendah akan menjadi *best practice* bagi daerah-daerah lain.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya artikel ini. Terima kasih juga diucapkan kepada tim editorial dan para reviewer yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan sehingga artikel ini dapat terbit.

VI. REFERENSI

- Amirudin, & Bisri, Z. (2006). *Pilkada Langsung Problem dan Prospek*. Pustaka Pelajar.
- Arif, M. S. (2020). Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi Covid-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2>

- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27. <https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Beaufort, M. (2018). Digital media, political polarization and challenges to democracy. *Information, Communication & Society*, 21(7), 915–920. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1451909>
- Beetham, D. (2016). Max Weber and the Legitimacy of the Modern State. *Analyses and Critics*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1515/auc-1991-0102>
- Dacombe, R., & Parvin, P. (2021). Participatory Democracy in an Age of Inequality. *Representation: Journal of Representative Democracy*, 57(2), 145–157. <https://doi.org/10.1080/00344893.2021.1933151>
- Estivani. (2021). *Strategi komunikasi komisi pemilihan umum (KPU) kota surabaya dalam mengelola Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Farisa, F. C. (2020). *Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan*. Kompas.Com.
- Faulk, K. (2010). *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Nusa Media.
- Handaningrum, R., & Rini, R. A. . (2014). Persepsi terhadap Kualitas Calon Legislatif (Caleg), dan Kepercayaan Politik (Political Trust) dengan Partisipasi Politik. *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(3), 223–236. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/persona/index>
- Hertanto. (2017). *Partisipasi Pemilih Tantangan Pemilu dan Pilgub*. Lampung Post.
- Hunger, J. D., & Wheelen, T. L. (2000). *Strategic Management*. Prentice Hall.
- Imanah, N. (2021). *Strategi Sosialisasi Pemilihan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di TPS pada Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Karmanis. (2021). Strategi Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Masa Pandemi Covid 19 Di Kota Semarang. *CENDEKIA Jaya*. <http://jurnal.untagcirebon.ac.id/index.php/cendekia-jaya/article/view/131>
- KPU Kota Banjarmasin. (2021). *Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2015 dan Tahun 2020*.
- Kubin, E., & von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: a systematic review. *Annals of the International Communication Association*, 45(3), 188–206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications.
- Pateman, C. (1970). *Participation and democratic theory*. Cambridge.
- Rojabiaturohmah, E., & Pujiarti, L. S. P. (2020). Keterlibatan Media Sosial sebagai Media Informasi Menjelang Pemilu 2019. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, 10(1). <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/932>
- Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Political Communication*, 35(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>
- Udani, A., Kimball, D. C., & Fogarty, B. (2018). How Local Media Coverage of Voter Fraud Influences Partisan Perceptions in the United States. *State Politics & Policy Quarterly*, 18(2), 193–210. <https://doi.org/DOI:10.1177/1532440018766907>
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, A. I. ., & Milla, M. . (2013). Peran Kepercayaan Politik dan Kepuasan Demokrasi terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa. *Jurnal Psikologi*, 9(2). <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/171>
- Wibawa, M. L. S. A. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Provinsi Bengkulu Tahun 2015. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan (JKP)*, 1(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1095>
- Wulandari, H. R., & Sari, M. M. K. (2020). Strategi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ponorogo di Tengah Pandemi Covid-19. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 10(1), 1–15.
- Yusuf, M. (2020). *Decision Support System di Era 4.0 Teori & Aplikasi Tool Analysis*. IPB Press.